

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hikmah disyariatkan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan intim dan bersifat ibadah antara pria dan wanita, serta dengannya juga membentuk keluarga baru dalam kehidupan sosial. Islam sangat cermat membahas hal tersebut, karena keluarga menyangkut dunia dan akhirat. Ditegaskan dalam al Quran surah at-Tahrim ayat 6 bahwa posisi keluarga menempati urutan kedua setelah diri sendiri yang harus dijaga dari siksa-Nya kelak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Q.S at-Tahrim: 66)”¹

Pada umumnya setiap perkawinan akan menyebabkan kelahiran, dari kelahiran tersebut akan menimbulkan banyak akibat hukum. Seperti hubungan waris, hubungan nasab, hubungan perwalian dan hubungan – hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subjek hukum baru ke dunia.

¹ Al-Quran Tarjamah. Penertbit SYGMA. Bandung. 2010

Dalam hukum waris, kelahiran anak merupakan peristiwa hadirnya ahli waris yang akan menduduki peringkat tertinggi dalam pewarisan, sedangkan menurut hukum keluarga kelahiran anak akan menjadi awal timbulnya hak dan kewajiban *alimentasi* orangtua kepada anaknya.²

Dari paparan diatas tampak tentang begitu kompleksnya dampak hukum dari suatu perkawinan. Demi menjaga ketertiban maka pemerintah membuat beberapa aturan tentang waris dan perkawinan. Peraturan tentang perkawinan di Indonesia dikenal dengan Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, didalamnya mengatur tentang syarat, rukun, larangan dan sahnya perkawinan. Mengenai sahnya perkawinan misalnya dapat dilihat dalam pasal 2 ayat (1) Undang - undang Perkawinan (UUP) nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa “perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”³. Selanjutnya Dalam ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) 1/1974 menyebutkan agar tiap-tiap perkawinan dicatat oleh negara. Dalam hal pencatatan diserahkan kepada Petugas Pencatatan Nikah (PPN). pencatatan ini dilakukan agar setiap perkawinan yang dilaksanakan memiliki kekuatan hukum Positif. Konsekwensi dari pasal ini, jika terjadi permasalahan atas perkawinan kelak negara dapat memberi kepastian hukum. Apabila pencatatan ini tidak dilakukan maka negara tidak memberi pengakuan atas perkawinan yang sudah terjadi. jika demikian pihak yang paling merasa di

² D.Y Witanto, *hak dan kedudukan anak luar kawin pascakeluarnya putusan MK tentang uji materiil undang-undang Perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012, hal. 3

³ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Grahamedia Press. Hal.2.

rugikan adalah pihak perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sang anak tidak mendapat haknya sebagaimana anak pada umumnya.

Dinegeri ini Pelaksanaan Undang-undang perkawinan ternyata belum maksimal. Terbukti Hingga saat ini tidak sedikit masyarakat melakukan praktek-praktek perkawinan yang melanggar pasal 2 yaitu tidak mencatatkan perkawinannya. Menurut Abdul Manan kondisi ini terjadi disebabkan beberapa faktor diantaranya kurangnya kesadaran hukum masyarakat, birokrasi yang berbelit-belit, kekhawatiran orangtua anak melakukan perzinahan, kondisi geografis yang jauh dari perkotaan, prosedur izin nikah yang sulit dari Pengadilan Agama. Adanya fenomena praktek perkawinan yang tidak tercatat mengakibatkan masalah sosial dan hukum, juga memunculah istilah baru yaitu *perkawinan bawah tangan* atau *perkawinan siri*.

Penelitian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukan bahwa perkawinan yang tidak diakui oleh negara (perkawinan dibawah tangan) masuk dalam lima besar faktor penyebab penelantaran anak Indonesia.⁴ Penelantaran anak ini karena dalam lingkungan sosial *anak luarkawin* sering mendapatkan perlakuan diskriminatif yang mengganggu tumbuh kembangnya. Diantara diantaranya yaitu tidak dapat mengakses hak-hak yang seharusnya diterima anak pada umumnya, bahkan lebih miris lagi jika kehadirannya dianggap bencana bagi keluarga. Dengan demikian perlu upaya hukum untuk melindungi hak-hak anak.

⁴ www.kpai.go.id/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia, Oleh David Setiawan, Diakses rabu 29/03/2017 pukul 12.30 wib.

Penyebab lain Penelantaran hak-hak anak dalam keluarga karena dalam Undang – undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 hanya mengatur tentang anak sah dan anak luar kawin. Dalam undang-undang tersebut anak sah disebut dalam pasal 42 dan penjelasan tentang anak luar kawin dalam pasal 43 ayat (1). Anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga dari ibu kandungnya. Frasa “**hanya**” dalam pasal 43 memberi batasan kepada anak luar kawin. Jadi antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya tidak memiliki hubungan keperdataan. Peraturan tentang Anak luar nikah dalam Pasal 43 UUP dipertegas dengan instruksi Presiden Nomor 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100 menyebutkan, “bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁵ Sebagai konsekwensinya dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum orangtua tunggal (ibu).

Begitu juga dalam KUH Perdata, hanya mengkategorikan anak menjadi 2 yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak sah diterangkan dalam pasal 205 KUH-Perdata yang berbunyi “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya”.⁶ Dari pasal diatas dapat ditarik pengertian bahwa anak sah menurut KUH Perdata adalah anak yang lahir atau anak yang ditumbuhkan dalam suatu perkawinan dan mendapatkan si suami sebagai bapaknya, dan pengertian sebaliknya dari rumusan pasal diatas

⁵ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Grahamedia Press.

⁶ Subekti dan R. Tjitrosuditio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya pramita.cet.ke-39. 2008. Hal. 69.

dikategorikan sebagai anak yang tidak sah.⁷ Sedangkan kedudukan anak luar nikah diterangkan dalam pasal 280 KUH perdata yang berbunyi “dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbul hubungan terhadap sang anak dan ibunya”.⁸ Jadi seorang anak luar nikah baru mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan ibu kandungnya setelah mendapat pengakuan dari orangtua kandungnya.

Pelebelan yang generalis terhadap anak luar nikah dimata hukum memiliki dampak negatif bagi sang anak, yakni anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatatkan dianggap sebagai anak tidak sah. Dalam redaksi pasal 43 menyamakan antara anak hasil zina dengan anak hasil nikah bawah tangan (siri). Harus dipahami disini adalah, ‘nikah dibawah tangan’ tidak sama dengan perkawinan *zina* atau *kumpul kebo*, perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan yang telah memenuhi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tetapi belum dicatatkan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2).

Tentang sahnya perkawinan dalam Undang-undang perkawinan Bagir Manan berpendapat, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) UUP 1/1974, mengenai pencatatan perkawinan yang di jelaskan pada pasal 2 ayat (2) hanya dipandang sebagai peristiwa penting bukan

⁷ Witanto. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (pasca keluarnya putusan MK tentang uji materil uu perkawinan)*, Jakarta Prestasi Pustaka, 2012. hal. 108.

⁸ *Op.cit*, hal.69.

suatu peristiwa hukum. Dalam hal ini akte nikah dan pencatatan nikah adalah sebagai alat bukti, namun bukan alat bukti yang menentukan.⁹

Terhadap anak luar kawin agar mendapat pengakuan oleh orangtuanya maka Negara memberi solusi *isbath nikah* dan *Penetapan asal usul anak*, yaitu sebuah terobosan hukum Untuk menyelamatkan nasib anak-anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan. Bagi masyarakat yang menganut agama Islam dapat melakukan *penetapan asal usul anak* di Pengadilan Agama, hal ini sudah diatur dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang wewenang Pengadilan Agama. Jika permohonan penetapan asal usul anak diterima sang anak akan mendapat penetapan dari Pengadilan. Dengan penetapan tersebut anak yang dilahirkan sebelum perkawinan dicatat menjadi tercatat sebagai anak sah dari pasangan yang mengajukan permohonan dan memiliki kekuatan hukum positif. Jika sebaliknya permohonan dinyatakan ***ditolak*** oleh pengadilan maka status anak yang lahir dari perkawinannya tetap tidak diakui oleh negara.

Seperti yang dialami oleh Sokib Bulbet bin Gini (suami) dan Riani binti Marsikan (istri) yang berdomisili di Kabupaten Kediri. Keduanya menikah tidak dicatatkan karena keduanya dinikahkan oleh ustadz kampung dan ketika akad berlangsung tidak di saksikan oleh PNN (KUA). Dari perkawinan bawah tangan itu lahirlah seorang anak. Dikemudian hari ternyata anaknya mendapat kendala karena tidak memiliki akte lahir yang menunjukan bahwa dia anak kandung dari kedua Pemohon. Akhirnya Di Tahun 2016 kedua orangtuanya mengajukan permohonan ke Pengadilan agama tingkat I Kabupaten Kediri agar anak yang

⁹ Lihat, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam dalam memahami status hukum perkawinan antar orang Islam di Indonesia*, Neng Djubaedah, Penerbit Sinar Grafika-jakarta. Hal. 158-159.

dilahirkan itu disahkan sebagai anak kandung dari kedua orangtuannya dengan alasan agar si anak dapat mengurus akte kelahiran untuk kepentingan Pendidiknnya. Akan tetapi Pengadilan memberi penetapan **menolak** permohonan kedua Pemohon di karenakan ada bukti yang tidak lengkap.

Mengenai putusan penetapan asal-usul anak sering terdapat perbedaan antara Pengadilan satu dengan lainnya. Perbedaan putusan ini menurut kalangan praktisi dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur dengan tegas status anak hasil nikah bawah tangan. Contoh kasus hakim Pengadilan Agama kabupaten Malang berani untuk memutuskan anak hasil perkawinan bawah tangan adalah anak sah. sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Kediri Hakim memberi putusan menolak anak hasil bawah tangan.

Dengan pengadilan memberi putusan menolak permohonan asal usul anak maka akan menyulitkan masadepan anak tersebut. Si Anak terancam tidak dapat mengakses hak-hak yang seharusnya diterima, baik itu dari orangtuannya atau dari negara karena tidak memiliki akte kelahiran. Sebagai warga negara akte kelahiran merupakan dokumen yang penting sebagai bukti autentik untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak. Dengan adanya akte ini, maka anak-anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak, misalnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman dan hak atas sistem perlindungan sosial.

Hakim Pengadilan Agama sebagai orang yang dipercaya mampu menghadirkan rasa keadilan dalam setiap putusannya. jika dalam putusan tidak

memuat rasa keadilan maka perlu dilihat *basic reason* atau *rasio decidendi* dalam putusnya. Karena jika suatu putusan tidak mengandung keadilan maka akan mengakibatkan suatu masalah baru setelah putusan tersebut dibacakan. Ini sejalan dalam intruksi Mahkamah Agung No: KMA/ 015/ INST/ VI/ 1998 menyebutkan, untuk mewujudkan peradilan yang berkualitas maka putusan hakim yang eksekutabel berisikan *etos* (integritas), *pathos* (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama), *filosofis* (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), *sosiologis* (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat), serta *logos* (diterima dengan akal sehat).

salah satu yang menjadi wibawa dari suatu putusan terletak pada *rasio decidendi*. *Rasio decidendi* yaitu, argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Ini penting agar putusan dihormati dan dihargai oleh masyarakat, terutama para pencari keadilan maka putusan yang dijatuhkan itu harus mengandung pertimbangan yang mantap dan jelas. Selain itu dalam pertimbangan juga harus mengandung *basic reason*, yakni alasan penilaian yang rasional, aktual dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan. Hakim Peradilan Agama tidak boleh bersikap diskriminatif, baik yang bersifat golongan maupun yang bersifat status sosial. Dengan demikian dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya diharapkan betul-betul murni dan tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang membuat ia tidak adil dalam menjatuhkan putusan.¹⁰

¹⁰ Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta. Prenada Media. Edisi Revisi Cet.3. 2005. Hal. 132.

Mengenai anak hasil perkawinan dibawah tangan (*siri*) hingga saat ini pemerintah belum membuat regulasi yang jelas. dengan keadaan seperti ini muncul kesulitan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang menyangkut persoalan anak hasil nikah siri. Beberapa hakim yang ekstrim sering menyamakan anak hasil nikah siri dengan anak zina padahal secara hakikat ini sangat berbeda. Dampak lainnya sering terjadi perbedaan putusan mengenai anak hasil nikah siri antar pengadilan agama, hakim pengadilan agama yang berpolafikir progresif akan mempertimbangkan kemaslahatan sang anak sedangkan hakim pengadilan agama yang berpolafikir tekstual (kaku) tidak menjadikan kemaslahatan anak sebagai pertimbangan. Maka dengan adanya perbedaan dalam pertimbangan hukum tersebut akan menghasilkan putusan yang berbeda pula. Dengan demikian patut kita bertanya, apakah setiap putusan PA sudah berhasil membawa rasa keadilan bagi anak Indonesia yang terlahir dari perkawinan siri atau bawah tangan??

Dari putusan hakim pada kasus Sokib diatas kemungkinan besbesar kemungkinan akan memunculkan permasalahan baru tentang status hukum perkawinan dan anak kedua Pemohon. Maka disini penulis tertarik untuk mengkaji secara komperhensif tentang **“Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Asal-Usul Anak (Studi kasus Perkara Nomor :0136/Pdt./2016/Pa.Kab.Kdr)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio decidendi* Hakim dalam memutuskan perkara nomor 0136/pdt.p/2016/pa.kab.kdr?
2. Bagaimana implikasi dari Putusan perkara nomor 0136/pdt.p/2016/pa.kab.kdr?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui *Ratio decidendi* Hakim terhadap perkara nomor 0136/pdt.p/2016/pa.kab.kdr.
2. Untuk mengetahui implikasi dari Putusan Perkara Nomor :0136/Pdt./2016/Pa.Kab.Kdr terhadap status perkawinan dan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki banyak manfaat, dan di golongan menjadi dua, yaitu:

Praktis :

1. Dapat memberikan masukan yang terbaik untuk pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara nomor 0136/pdt.p/2016/pa.kab.kdr
2. Bagi penulis, meningkatkan pemahaman tentang peran Hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara penetapan asal usul anak.

Teoritis :

1. Tulisan ini bisa menjadi tambahan literatur bagi mahasiswa syariah terutama yang ingin mendalami di bidang asal-usul anak.
2. Menjadi bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa terutama yang mengambil jurusan Syariah Akhwal as-Syakhsyah.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan upaya yang dilakukan untuk menjawab sebuah permasalahan. Sehingga perlu memilih metode yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, agar dapat mengungkapkan suatu kebenaran yang sistematis, metodologis dan konsisten.¹¹

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif, yakni melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat. Penelitian kualitatif hanya menggunakan data-data yang berkualitas saja seorang peneliti yang menggunakan metode analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.¹²

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum diperlukan data atau sering disebut juga bahan Hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

a. Sumber primer

Sumber primer penelitian ini meliputi :

¹¹Dalam Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. 2013. Penerbit Sinar Grafika. Hal.17.

¹²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta penerbit pustaka pelajar. 2010. Hal. 192.

- 1) UUD RI 1945
- 2) KUH Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 6) Kompilasi Hukum Islam
- 7) Peraturan Perundang-undangan lainnya

b. Sumber Skunder.

yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu berupa buku literatur, journal dan buku-buku bacaan lainnya.

c. Sumber tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus, glossary dan lain-lain.

d. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian data merupakan bagian terpenting, sehingga peneliti harus memilih teknik pengumpulan data yang sesuai dengan jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, sehingga teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah :

a. Studi Dokumen.

Yang dimaksud dengan studi dokumen adalah, meneliti validitas dari bahan hukum primer dan skunder.¹³ Peneliti dapat melakukan kajian pustaka untuk meneliti validitas data tersebut.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu, pengumpulan data dari buku-buku hukum dan jurnal hukum dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori atau penemuan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Wawancara.

Wawancara dilakukan agar peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini wawancara difokuskan kepada Hakim sebagai pihak yang memutuskan Perkara ini.

d. Teknik analisa data

Sebelum di analisis Data dan bahan hukum yang sudah terkumpul akan disusun secara sistematis serta diklasifikasikan agar nantinya mudah dalam menganalisa. Dalam menganalisa akan digunakan teknik Deskriptif dengan model pendekatan Analitis (Analytical Approach) . teknik Deskriptif Maksudnya adalah, memberikan gambaran dan

¹³Amiruddin dan zainal asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Rajawali Press. 2004. Hal. 68.

penjelasan terkait objek dan subjek sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Sedangkan pendekatan analitis (Analytical Approach), mencari makna di dalam undang-undang yang kemudian dan menguji penerapannya secara praktis melalui putusan pengadilan.¹⁴

F. Sistematika Kepenulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya. Dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat ketentuan umum tentang hukum perkawinan di Indonesia dalam tinjauan KUH Perdata dan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, perlindungan anak dalam pandangan hukum di Indonesia juga cara memberi penetapan asal usul bagi anak dan menjelaskan Peran hakim dalam penemuan hukum.

BAB III ANALISA *RASIO DECIDENDI* HAKIM DALAM PERKARA NOMOR : 0136/PDT.P/2016/PA.KAB.KDR TENTANG PENOLAKAN ISBAT NIKAH DAN ASAL USUL ANAK

¹⁴*Ibid.* hal 187.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai duduk perkara terlebih dahulu dan setelahnya fokus analisa *ratio decidendi* hakim pengadilan agama kabupaten kediri dalam putusannya nomor 0136/pdt.p/2016/pa. Kab.kdr yang menolak isbat nikah dan asal usul anak

BAB IV PENUTUP

Meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup

